

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA
PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh :

LUTHFIA FEBRINA HARDI

2110112028

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

Dosen Pembimbing :

Dr. Yuslim, S.H., M.H.

Hendria Fithrina, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg: 03/PK-VII/I/2025



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Luthfia Febrina Hardi	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh / 8 Februari 2003 b. Nama Orang tua : Jeni Hardi dan Indra Yeni c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2110112028	f. Tanggal Lulus : 15 Januari 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3,71 j. Alamat : Payolanssek, Kota Payakumbuh	

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG

(Luthfia Febrina Hardi, 2110112028, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman + ix halaman, 2025)

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota dan sumber penerimaannya diserahkan kepada pemerintahan daerah. Pemungutan PBB-P2 sulit dilakukan karena banyak wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menghambat pendapatan utama daerah. Wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan yang bertujuan menciptakan kepatuhan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Padang? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Padang?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini: 1. Sanksi administratif yang sudah diterapkan adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemasangan pengumuman dan denda 1% (satu persen) perbulan dihitung saat jatuh tempo. Namun penerapan sanksi tersebut dirasa belum maksimal. 2. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi yaitu terbagi atas faktor yuridis dan non yuridis. Untuk kesempurnaan penerapan sanksi administratif, hendaknya masyarakat turut aktif dalam pembayaran pajak guna memaksimalkan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Administratif, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 15 Januari 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Gusminarti, S.H., M.H.	Darnis, S.H., M.H.


Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Student Name : Luthfia Febrina Hardi	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Payakumbuh / 8 February 2003 b. Parents Name : Jeni Hardi and Indra Yeni c. Faculty : Law d. Concentration : Administrative Law e. No. BP : 2110112028	f. Graduation Date : 15 January 2025 g. Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 Years 5 Month i. GPA : 3,71 j. Address : Payolasek, Payakumbuh City	

THE APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR TAXPAYERS WHO ARE LATE IN PAYING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX (PBB-P2) IN PADANG CITY

(Luthfia Febrina Hardi, 2110112028, Concentration Program Administrative Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 70 pages + ix pages, 2025)

ABSTRACT

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one type of local tax that is managed by the city government and the source of revenue is submitted to the local government. PBB-P2 collection is difficult because many taxpayers do not fulfill their obligations, thus hampering the main revenue of the region. Taxpayers who violate the provisions of tax laws and regulations will be subject to administrative sanctions. The provision of administrative sanctions is a form of law enforcement in the field of taxation that aims to create compliance and provide a deterrent effect to taxpayers not to repeat the offense. The formulation of the problems discussed in this thesis are: 1. How is the application of administrative sanctions for taxpayers who are late in paying rural and urban land and building tax in Padang city? 2. What are the inhibiting factors in the application of administrative sanctions for taxpayers who are late in paying rural and urban land and building taxes in Padang city? The research method that the author uses is empirical juridical or can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in the community. The results of this study: 1. Administrative sanctions that have been applied are verbal warnings, written warnings, posting announcements and a fine of 1% (one percent) per month calculated at maturity. However, the application of these sanctions is not maximized. 2. The inhibiting factors in the application of sanctions are divided into juridical and non-juridical factors. For the perfection of the application of administrative sanctions, the community should actively participate in tax payments in order to maximize local revenue.

Keywords: Implementation, Administrative Sanctions, Rural and Urban Land and Building Taxes

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by Januari, 15th 2025

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
Name	Gusminarti, S.H., M.H.	Darnis, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of Administrative Law : **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University
No. Faculty Alumni:	Name: Signature :
No. University Alumni:	Name: Signature :